

PENENTUAN PRIORITAS STRATEGI MARITIM MENGHADAPI KONFLIK

DETERMINING MARITIME STRATEGY PRIORITIES IN DEALING WITH CONFLICT

Pramandita W,^{1*} Anondo A,² Harsono G,¹ Arismunandar S²

¹Prodi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia

²Prodi Strategi dan Kampanye Militer, Sekolah Staf dan Komando TNI

*Koresponden email: wpramandita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Strategi Maritim Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan (LCS) yang memiliki potensi besar untuk mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kapasitas pertahanan maritim Indonesia serta menentukan prioritas strategi yang harus diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan pendekatan sequential exploratory yang menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi dan analisis AHP untuk pemilihan strategi terbaik. Narasumber dalam penelitian ini adalah praktisi dan akademisi yang berkompeten. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan strategis yang holistik, melibatkan kekuatan militer dan nir-militer, melalui pendekatan strategi kehadiran di laut (*presence at sea*), pemanfaatan sumber daya kelautan (*explore/exploit the sea*) dan diplomasi maritim (*trust build by sea*) yang kuat, sangat penting untuk menjaga stabilitas dan menghindari spill over conflict di wilayah perairan Indonesia. Kesimpulannya, strategi yang terukur dan adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika konflik di LCS.

Kata kunci: Konflik, faktor, strategi maritime, Laut Cina Selatan

ABSTRACT

This research discusses Indonesia's Maritime Strategy in dealing with conflict in the South China Sea (SCS) which has great potential to threaten national sovereignty and security. The aim of this research is to analyze internal and external factors that influence Indonesia's maritime defense capacity and determine strategic priorities that must be implemented. This research uses a mixed method with a sequential exploratory approach which uses SWOT analysis to determine strategies and AHP analysis to select the best strategy. The resource persons in this research are competent practitioners and academics. Data collection was carried out by interviews and questionnaires. The research results show that a holistic strategic approach, involving military and non-military forces, through strategic approaches of presence at sea, utilization of marine resources (explore/exploit the sea) and maritime diplomacy (trust build by sea) is strong, it is very important to maintain stability and avoid spill over conflict in Indonesian territorial waters. In conclusion, a measurable and adaptive strategy is needed to deal with conflict dynamics in the SCS.

Keywords: Conflict; factors; maritime strategy, South China Sea

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis berada di perlintasan perdagangan dunia antara Samudera Hindia dan Pasifik, menjadikannya sebagai area strategis bagi kepentingan nasional dan global. Namun demikian, posisi ini juga membawa tantangan, terutama terkait konflik perbatasan dengan negara-negara tetangga. Salah satu isu utama adalah sengketa di Laut Natuna Utara (LNU) dengan Vietnam dan keterlibatan China di Laut Cina Selatan (LCS), yang berpotensi memicu ketegangan dan menambah kompleksitas isu keamanan maritim di kawasan tersebut.

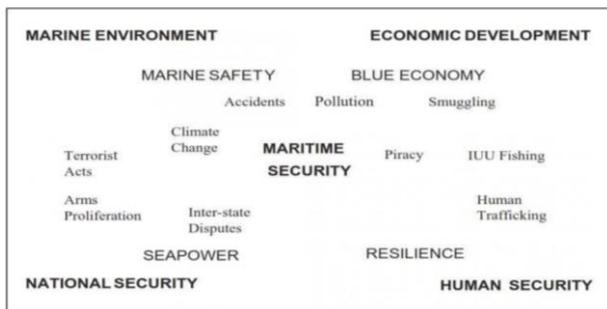
Indonesia dan Vietnam memang telah berusaha menyelesaikan konflik terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan kesepakatan antar kepala negara pada Desember tahun 2022, namun tantangan masih ada, khususnya terkait dengan eskalasi konflik LCS. Konflik antar negara pantai seperti Brunei, China, Filipina, Malaysia, Taiwan dan

Vietnam mengalami dinamika yang lebih luas, di mana persaingan antara China dan Amerika Serikat juga terjadi dan berpotensi menimbulkan eskalasi konflik yang dapat membawa dampak pada Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keamanan maritim yang efektif dan kerjasama internasional.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu mengembangkan Strategi Maritim yang komprehensif dan holistik, yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, militer dan nir-militer. Strategi ini harus mencakup penguatan pertahanan, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan kapasitas diplomasi yang handal. Selain itu juga sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki maka perlu untuk ditentukan skala prioritas dari strategi-strategi yang ditetapkan.

Kerangka kerja keamanan maritim Bueger (2015) yang digambarkan dalam matrix keamanan maritim menunjukkan keterhubungan setiap anca-

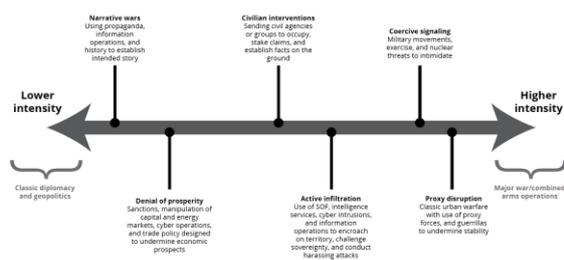
man dalam dimensi ruang maritim yang sama sehingga pemecahan masalah kemaritiman harus diselesaikan melalui pendekatan holistik.



Gambar 1. Maritime Security Matrix
 Sumber: Christian Bueger (2015)

Dengan situasi yang semakin kompleks di LCS, Indonesia harus memastikan bahwa strategi maritimnya mampu menjaga kedaulatan nasional dan menghadapi ancaman yang muncul. Kolaborasi lintas sektor, integrasi teknologi, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi menjadi kunci dalam merumuskan strategi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi stabilitas dan keamanan nasional di wilayah maritim.

Gambaran kompleksitas ini mendorong China menjaga eskalasi dengan menerapkan pendekatan “gray zone strategy” (Kapusta, 2015). Mazarr (2015) memberikan visualisasi tentang konflik “gray zone” dan menunjukkan maksud di balik penggunaannya. Ia memasukkan instrumen sipil untuk mencapai tujuan militer dan membedakan kerangka pikirnya dibandingkan dengan clausewitz. Menurutnya gray zone strategy tidak selalu mengandung kekerasan dan merupakan bentuk konflik yang lebih longgar.



Gambar 2. Bagan Gray Strategy
 Sumber: Michael Mazarr (2015)

Gray zone strategi merupakan implementasi pendekatan strategi hedging dalam konteks hubungan internasional yang diterapkan oleh China dalam mengelola konflik di LCS ditengah tekanan Amerika dan sekutunya yang berkepentingan terhadap kebebasan berlayar di LCS. Lebih lanjut tampak nyata pendekatan hedging yang dilakukan melalui penguatan klaim teritorial dengan membangun pulau buatan, mendorong kerjasama ekonomi

dalam program BRI, melakukan kerjasama kemitraan dengan ASEAN, mempromosikan konsep “historic rights” atas wilayah klaimnya, dan membina hubungan kerjasama bilateral dengan negara-negara klaim dan non klaim yang berpengaruh di sekitar kawasan.

Kombinasi sipil dan militer di atas perlu untuk dihadapi dengan pendekatan yang senada, oleh sebab itu, ini perlu dihadapi dengan pendekatan yang holistik, melibatkan pertahanan militer dan pertahanan nir-militer. Dalam menghadapi konflik di LCS, Jangkara Hanneg memberikan panduan pembangunan postur pertahanan militer dan postur pertahanan nir-militer. Pembangunan postur militer meliputi pembangunan SDM yang adaptif dan responsif, pemenuhan pokok kekuatan, integrasi jaringan sistem trimatra terpadu, modernisasi alutsista TNI, pembentukan komponen cadangan dan pendukung.

Sedangkan pembangunan postur pertahanan nir-militer melalui perumusan kebijakan bidang Hanneg terkait tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga sesuai ancaman non-militer dan unsur yang menanganinya, menyusun mekanisme koordinasi, mengelola sumber daya dan sarana prasarana nasional dan mewujudkan kemampuan pertahanan nirmiliter termasuk kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan iptek, ekonomi, sosial budaya, moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

Ditengah sikap “abu-abu” China yang tetap asertif dan cenderung provokatif, Indonesia harus mengambil pendekatan langkah-langkah strategi yang luas melibatkan seluruh pihak terkait atau pemangku kepentingan. Hal ini dapat berarti bahwa diperlukan beberapa langkah strategis untuk menghadapi situasi konflik di LCS. Dalam menghadapi dinamika kompleks di LCS, Strategi Maritim Indonesia menjadi elemen kunci dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

Secara teori, strategi hedging dan turunannya yaitu strategi engagement merupakan kerangka pendekatan dalam mengelola konflik di LCS yang tampaknya telah diimplementasikan sejauh ini dan menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mengelola konflik sehingga tidak menimbulkan eskalasi yang mengarah pada perang terbuka di laut. Strategi Hedging dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonominya dan saat bersamaan memperkuat hubungan keamanan dengan kekuatan lain seperti Amerika Serikat untuk menyeimbangkan pengaruh China di kawasan serta mengambil bagian dalam forum multilateral untuk menyelesaikan sengketa secara damai sambil mempertahankan klaim kedaulatan mereka.

Lebih lanjut dilakukan pendekatan strategi *engagement*, dengan melakukan negosiasi bilateral atau multilateral antara China dan negara-negara ASEAN untuk mencari solusi damai terhadap klaim teritorial yang bersaing, mendorong kerjasama dalam isu-isu non-tradisional seperti perikanan, perlindungan lingkungan maritim, dan penelitian ilmiah, yang dapat membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan, serta mendorong inisiatif *Code of Conduct (CoC)* untuk mencegah eskalasi konflik dan mempromosikan stabilitas.

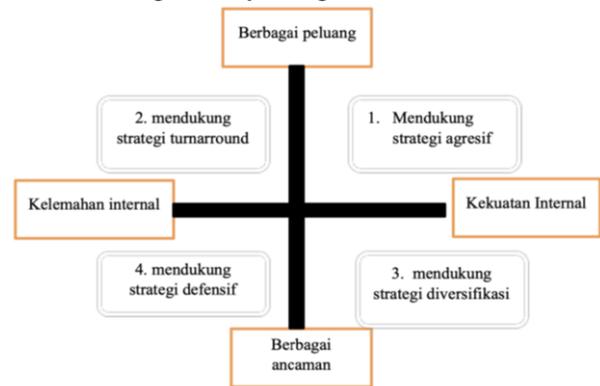
Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki, maka selanjutnya diperlukan prioritas penentuan strategi menghadapi situasi konflik di LCS. Penelitian ini mengusulkan pendekatan holistik dan terstruktur untuk menentukan prioritas Strategi Maritim Indonesia dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)* dan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Analisis SWOT akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengelola konflik di LCS, sementara AHP akan memberikan landasan matematis untuk menentukan prioritas Strategi Maritim Indonesia. Integrasi antara SWOT dan AHP diharapkan menciptakan pendekatan komprehensif yang menggabungkan perspektif internal dan eksternal serta aspek kualitatif dan kuantitatif untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim nasional.

METODE

Penelitian menggunakan metode *mixed methods* dengan *sequential exploratory* yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara berurutan (*sequential*). Menurut Creswell (2010), penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Tahap awal menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami makna yang dianggap bersumber dari problematika sosial dan kemanusiaan. Metode kualitatif yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis dengan analisis *Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT)* yang dapat dikembangkan menjadi *grounded theory* melalui analisis teori dan analisis konteks pada data primer dari observasi dan wawancara serta data sekunder dari literatur berupa buku, jurnal dan laporan sesuai prosedur secara induktif mulai dari tema khusus menjadi tema umum dan menafsirkannya (Bandur, 2016).

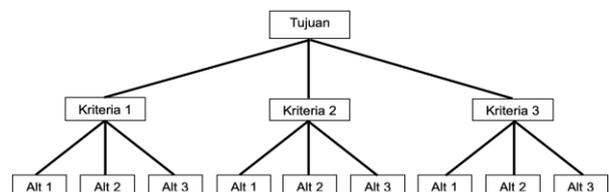
SWOT menggunakan pendekatan yang sistematis, memiliki fleksibilitas dan terutama mengintegrasikan semua faktor yang berpengaruh dalam mencapai suatu tujuan strategis. SWOT mengom-

binasikan faktor internal dan eksternal yang dominan sehingga secara mendasar menyediakan 4 model strategi (Fredy Rangkuti, 2018).



Gambar 3. Diagram SWOT
Sumber: Fredy Rangkuti (2018)

Pada tahap selanjutnya menggunakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan digunakan untuk mengetahui nilai variabel yang dihasilkan dari data berbentuk angka dan perhitungan. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan *Analytical Hierachy Process (AHP)*. AHP adalah metode analisis multi-kriteria yang digunakan untuk menghitung prioritas dan pengaruh antara beberapa variabel atau faktor. AHP menyusun struktur hirarki keputusan yang terdiri dari tujuan (*goal*) sebagai tingkat tertinggi, kriteria sebagai tingkatan kedua dan alternatif yang dibandingkan sebagai tingkatan paling rendah.



Gambar 4. Struktur Hirarki Keputusan AHP

Metode ini menggunakan matriks prioritas dan menggunakan analisis matriks untuk menentukan prioritas tertinggi.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Berpasangan

	Kriteria-1	Kriteria-2	Kriteria-3	Kriteria-n
Kriteria-1	K11	K12	K13	K1n
Kriteria-2	K21	K22	K23	K2n
Kriteria-3	K31	K32	K33	K3n
Kriteria-m	Kn1	Kn2	Kn3	Kmn

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konflik LCS

Laut China Selatan adalah wilayah perairan yang membentang dari barat daya ke timur laut, dibatasi di selatan oleh Selat Karimata dan di utara

oleh Selat Taiwan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 4 juta kilometer persegi dan merupakan pusat sengketa antar negara-negara pesisir serta pihak lain yang berkepentingan.

LCS adalah laut semi-tertutup yang berbata-san dengan China dan Taiwan di utara, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia di barat, Filipina di timur, serta Indonesia dan Malaysia Timur di selatan. Wilayah ini terdiri dari landas kontinen yang dangkal dan beberapa bagian yang lebih dalam. Pusat konflik di LCS adalah gugusan Kepulauan Spratly, yang dekat dengan beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan China. Gugusan lainnya yang penting adalah Pulau Pratas, Pulau Paracel, dan Karang Macclesfield.

Indonesia telah memperbarui nama bagian dari LCS di wilayah utara Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara (LNU) pada tahun 2017 untuk menyesuaikan dengan nama yang telah digunakan dalam industri migas. Penamaan ini menimbulkan kontroversi dari China, yang menganggap perubahan tersebut tidak kondusif dan tidak sejalan dengan upaya standardisasi penamaan geografis. Namun, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa penamaan ini sesuai dengan ketentuan internasional dan bertujuan untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim di LCS, kehadiran KIA (Kapal Ikan Asing) dan kapal pemerintah China di sekitar LNU membuat Indonesia terlibat secara tidak langsung dalam konflik di LCS. Penetapan Laut Natuna Utara bertujuan untuk mengamankan ZEE Indonesia serta memperjelas pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.



Gambar 5. Peta Konflik LCS

Sumber: Unclos (2024)

Konflik di LCS pertama kali mencuat pada tahun 1970-an dan terus berlanjut hingga kini, melibatkan negara-negara pesisir seperti China, Viet-

nam, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Konflik ini berfokus pada penguasaan atas gugusan pulau dan karang di wilayah Spratly, yang telah berpindah kekuasaan sejak era kolonialisme.

Pada abad ke-20, LCS dikuasai oleh Perancis (1933-1939), Jepang (1939-1945), dan Sekutu (1945-1951). Pada tahun 1947, China menerbitkan peta dengan klaim Sembilan Garis Putus-putus (*Nine-Dashed Line*), yang menjadi sumber konflik. Sejalan dengan kesadaran penguasaan wilayah laut dengan berkembangnya hukum laut internasional, tahun 1970-an, negara-negara pantai mulai memperkuat klaim mereka dengan tindakan nyata seperti pengibaran bendera dan pembangunan pos militer.

Tahun 1974 terjadi Konflik bersenjata antara China dan Vietnam di Kepulauan Paracel, menewaskan lebih dari 70 tentara Vietnam. Berlanjut tahun 1988, bentrokan pertama antara China dan Vietnam di Fiery Cross Reef, mengakibatkan 64 pelaut Vietnam tewas. Pada tahun 1992, Malaysia dan Vietnam mencapai kesepakatan bersama tentang batas wilayah, yang diprotes oleh China.

Perkembangan konflik terus terjadi hingga kini. Tahun 2012, terjadi bentrokan maritim antara China dan Filipina di Dangkal Scarborough. Filipina mengajukan gugatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA) pada Januari 2013 dan tahun 2016, PCA memutuskan bahwa klaim China atas LCS melalui Sembilan Garis Putus-putus tidak sah, namun China menolak putusan ini.

Tahun 2020, Ketegangan antara China dan Vietnam meningkat akibat insiden penyerangan kapal nelayan Vietnam oleh kapal China. Terkait dengan Indonesia sendiri, tahun 2021, terjadi gangguan oleh China terhadap eksplorasi SKK Migas di Laut Natuna Utara (LNU). Terkini, sepanjang 2023-2024, ketegangan meningkat antara China dan Filipina terkait Bajo de Masinloc, yang memuncak dengan serangan China menggunakan meriam air terhadap kapal penjaga pantai Filipina.

Konflik LCS terus mempengaruhi dinamika strategis di kawasan Asia Tenggara dan global, dengan potensi eskalasi menjadi konflik militer yang lebih luas. Meskipun berbagai upaya hukum dan diplomasi telah dilakukan, situasi tetap tegang dan kompleks, terutama dengan terus diperkuatnya klaim maritim oleh China dan negara-negara lain yang bersengketa.

Kepulauan Spratly menjadi salah satu wilayah dengan potensi konflik militer di masa depan karena sengketa yang melibatkan enam pesisir dengan klaimnya masing-masing. Beragam klaim diajukan baik atas dasar sejarah, penemuan, pendudukan, dan pemeliharaan hubungan dengan pulau-pulau tersebut selama berabad-abad. Duta Besar Jerman, Bapak Havas, dalam webinar tahun

2021 menyatakan bahwa tidak ada satu pun negara pengklaim yang memiliki dasar klaim yang kuat atas Kepulauan Spratly.

Tabel 2. Dasar Klaim

Negara	Dasar Klaim
China	Catatan sejarah kuno, peta, dan penggunaan oleh nelayan sejak 2000 tahun lalu. Klaim ini diperkuat oleh perjanjian dengan Perancis pada tahun 1887 dan nine dashed line yang digambarkan oleh Pemerintah Kuo Mintang
Taiwan	Sejarah Dinasti Han, Sung, dan Yuan, yang sejajar dengan klaim China, namun status politik Taiwan menambah kompleksitas sengketa ini.
Vietnam	Sejarah pada masa Kaisar Gia Long tahun 1802 yang kemudian bergabung dengan Vietnam pada tahun 1832.
Filipina	Penemuan Tomas Cloma pada tahun 1956 dan kedekatan geografis dengan teritorialnya, serta kebutuhan mendesak untuk pertahanan nasional.
Malaysia	Publikasi peta landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tahun 1979, serta didukung oleh penguasaan Inggris atas Sabah dan Sarawak.
Brunei	Landas kontinen dan ZEE-nya Berdasarkan UNCLOS

Indonesia sendiri tidak terlibat langsung sebagai pengklaim, tetapi mulai "terlibat" dalam sengketa LCS sejak 2010 setelah China mengklaim perairan yang termasuk ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna. Indonesia juga mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada peta resmi tahun 2017. Konflik LCS diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan, mengingat dinamika dan perkembangan terkini. Beberapa skenario potensial termasuk peningkatan militerisasi dan pembangunan pulau artifisial oleh China, yang akan memicu ketegangan dengan negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat.

Amerika Serikat diperkirakan akan terus menegaskan komitmennya terhadap kebebasan navigasi di kawasan ini, yang dapat memperparah ketegangan dengan China, terutama dalam konteks persaingan hegemoni geopolitik. Selain itu, peningkatan anggaran militer oleh negara-negara di kawasan juga mengindikasikan potensi perlombaan senjata, meskipun banyak negara menyatakan tidak berniat masuk dalam kontestasi kekuatan bersenjata. Di sisi lain, dinamika ASEAN dan negosiasi *Code of Conduct* (COC) dengan China terus menghadapi hambatan, yang menyebabkan ketidakpastian berkelanjutan di kawasan. Situasi ini dapat memperlemah saling percaya dan meningkatkan risiko konflik, khususnya terkait konflik terbuka skala kecil di perbatasan laut atau udara. Jika

konflik-konflik kecil ini tidak segera diselesaikan melalui diplomasi, mereka berpotensi memicu konfrontasi yang lebih besar antara China dan negara-negara claimant lainnya.

Kebijakan di LCS dipengaruhi oleh berbagai dinamika, salah satunya adalah *Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) yang disepakati oleh ASEAN dan China pada tahun 2002. DoC bertujuan untuk menjaga stabilitas di LCS, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan membangun saling percaya antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, implementasi DoC kurang efektif karena masih adanya tindakan provokatif, terutama oleh China. Negosiasi untuk menyusun *Code of Conduct* (CoC) yang lebih mengikat masih menghadapi tantangan, terutama karena perbedaan kepentingan antara China dan ASEAN.

Selain itu, terdapat kerangka kerja sama internasional yang secara langsung dan tidak langsung muncul terkait dengan dinamika lingkungan strategis di LCS seperti BRICS, QUAD, dan AUKUS juga memiliki pengaruh signifikan terhadap konflik di LCS. BRICS, yang dipimpin oleh China, cenderung mendukung klaim China secara tidak langsung melalui kerja sama ekonomi dan politik yang erat. Sementara itu, QUAD yang terdiri dari Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia, bertujuan untuk menyeimbangkan pengaruh China di LCS melalui peningkatan kehadiran militer di kawasan. Sedangkan AUKUS yaitu pakta trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, bertujuan untuk memperkuat kapabilitas militer Australia, khususnya di bidang bawah laut, yang dapat diduga sebagai sekutu Amerika Serikat untuk mendukung operasi militer di LCS. Keberadaan pakta kerjasama ini semakin meningkatkan ketegangan dengan China.

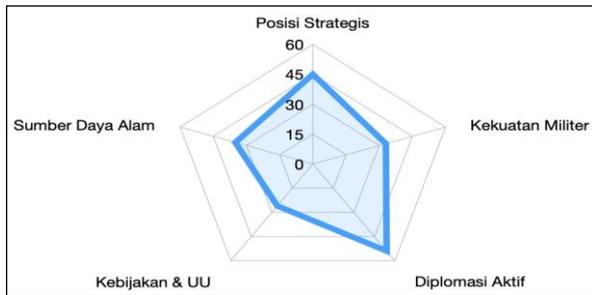
ASEAN berusaha memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan di LCS melalui diplomasi dan instrumen hukum, seperti DoC dan negosiasi CoC. Namun, peran ASEAN dalam mengelola konflik sering kali terhambat oleh perbedaan pendapat di antara negara anggotanya dan kurangnya komitmen penuh dari semua pihak. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari pendekatan konsensus yang menjadi landasan ikatan kerja sama di ASEAN. Beberapa negara ASEAN lebih condong ke arah kebijakan Barat, sementara yang lain seperti Laos dan Kamboja, cenderung lebih mendukung China, menambah kompleksitas dalam mencapai kesepakatan kolektif yang kuat.

Demikian juga dengan kebijakan *Freedom of Navigation Operations* (FONOPS) yang dijalankan oleh Amerika Serikat juga meningkatkan risiko eskalasi. FONOPS bertujuan untuk menantang klaim sepihak China atas LCS dan menegaskan kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.

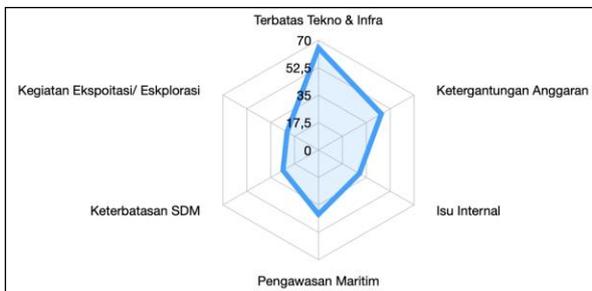
Amerika Serikat secara rutin mengirimkan kapal perangnya ke wilayah sengketa LCS, yang meningkatkan ketegangan dengan China. Kebijakan ini mendapat dukungan dari beberapa negara ASEAN yang juga mengklaim wilayah di LCS, meskipun di sisi lain, kebijakan ini juga berisiko memperburuk ketegangan dan meningkatkan potensi konflik di kawasan.

b. Faktor-Faktor Pengaruh

Hasil pengumpulan data mendapatkan sejumlah potensial kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Faktor kekuatan yaitu posisi strategis, sumber daya alam, kekuatan militer, eksistensi kebijakan & UU serta diplomasi aktif. Faktor kelemahan yaitu terbatasnya teknologi dan infrastruktur, ketergantungan anggaran, kegiatan eksploitasi/eksplorasi, keterbatasan SDM, isu internal dan pengawasan maritim.

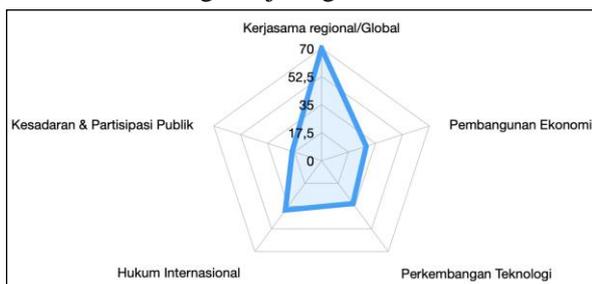


Gambar 5. Diagram Jaring Faktor Kekuatan

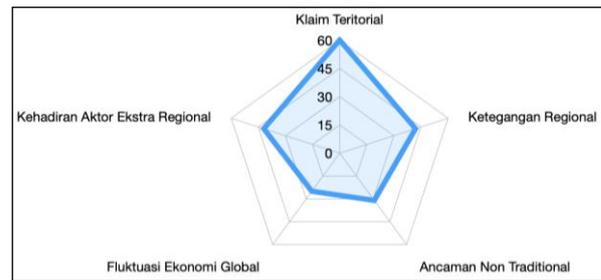


Gambar 6. Diagram Jaring Faktor Kelemahan

Faktor peluang meliputi kerja sama regional/global, pembangunan ekonomi, kesadaran & partisipasi publik, keberadaan hukum internasional dan perkembangan teknologi. Sedangkan faktor ancaman yaitu klaim teritorial, ketegangan regional, kehadiran aktor ekstra regional, fluktuasi ekonomi global dan ancaman non tradisional. Tingkat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat dilihat dalam diagram jaring dibawah ini.



Gambar 7. Diagram Jaring Faktor Peluang



Gambar 8. Diagram Jaring Faktor Ancaman

c. Strategi Maritim di LCS

Dari hasil sintesa faktor-faktor tersebut, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT yang dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Diagram SWOT

	Kekuatan: - Diplomasi aktif - Posisi Strategis - Kekuatan militer - SDA - Kebijakan & UU	Kelemahan: - Keterbatasan teknologi dan infrastruktur - Ketergantungan anggaran - Pengawasan maritim - Keterbatasan SDM - Kegiatan eksploit/eksplor
Peluang - Kerjasama regional/Int'l - Pembangunan ekonomi - Hukum internasional - Perkembangan teknologi - Kesadaran & partisipasi publik	- Gelar patroli diperbatasan - Forum-forum - Penelitian dan pengembangan - Peningkatan kapasitas/ Kapabilitas militer	- Pertukaran informasi - Provisional arrangement - Patroli koordinasi
Ancaman - Klaim teritorial - Kehadiran aktor ekstra regional - Ketegangan regional - Ancaman non tradisional - Fluktuasi ekonomi global	- Gelar patroli diperbatasan - Hard dan Soft Diplomacy - Kebijakan kelautan - Pembinaan kemampuan Wilayah Pertahanan	- Gelar patroli diperbatasan - Pemberdayaan potensi SDA wilayah - Penyelesaian batas wilayah

Dari uraian tentang potensi langkah dan upaya yang dihasilkan dari sintesa faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dapat dirumuskan 3 strategi utama dalam menghadapi konflik di LCS adalah:

Pertama, strategi kehadiran di laut atau *Presence at Sea*. Kehadiran kekuatan maritim baik angkatan laut maupun aparat penegak hukum baik yang memiliki sarana kapal patroli yang berwenang di wilayah perbatasan dalam Zona Ekonomi Eksklusif yaitu TNI, Bakamla RI dan KKP secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan intensi dan penguasaan efektif terhadap hukum nasional Indonesia. Kehadiran kapal patroli penegak hukum merupakan bentuk upaya diplomasi maritim yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan tindakan koersif, pengumpulan informasi untuk menghasilkan gambaran situasi maritim dan membangun kerjasama dan interaksi dengan pihak eksternal baik dalam konteks global maupun negara-negara yang berbatasan.

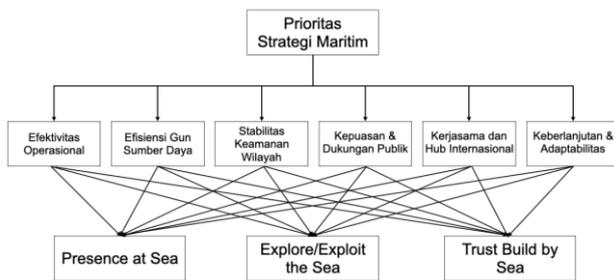
Kedua, strategi eksplorasi dan eksploitasi di laut atau *explore/exploit the Sea*. Laut Natuna Utara merupakan wilayah laut yang terhubung dengan LCS memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Hukum Internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga memberikan hak berdaulat atas pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kolom air (rezim laut ZEE) maupun

yang ada di dasar laut (rezim laut landas kontinen). Potensi sumber daya alam ini harus dapat diberdayakan secara optimal bagi kepentingan pembangunan nasional dan masyarakat pesisir di sekitar wilayah LNU. Kehadiran aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas dan sumber daya alam lain termasuk perikanan menunjukkan intensi dan penguasaan efektif terhadap wilayah yang menjadi bagian dari hak berdaulat Indonesia.

Ketiga, strategi membangun kepercayaan dengan diplomasi atau *Trust Build by Sea*. Indonesia merupakan salah satu founding fathers ASEAN. Dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai, maka Indonesia memiliki kapasitas untuk berperan dalam upaya menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di kawasan termasuk dalam konflik di LCS. Upaya diplomasi sangat penting untuk membangun saling percaya. *Provisional arrangements* merupakan salah satu kerangka kerja dalam hukum laut Internasional yang disediakan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik. Kerjasama dalam berbagai bidang termasuk antar aparat penegak hukum dari negara-negara yang saling berbatasan dapat menjadi media untuk membangun saling percaya dan kesepahaman antara negara yang berbatasan.

d. Penentuan Prioritas Strategi

Penentuan strategi dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan metode yang kuat dan efektif karena kerangka kerja yang sistematis, terstruktur, konsisten dan fleksibel. Secara hirarkis dapat digambarkan struktur keputusan sebagai berikut:



Gambar 9 Struktur Hirarki AHP

Berdasarkan hasil pengumpulan data kuisisioner dan diolah dengan menggunakan kalkulasi matriks perbandingan berpasangan yang tersusun dalam tabulasi berikut ini.

Tabel 3. Ranking Kriteria dan Alternatif

	Efektif Ops	Efisiensi Gun SD	Terjaga Stabilitas & Kam	Duk publik Intern'l dan Nasional	Terjalannya Kerma & hub. intern'l	Kelanjutan/ adaptasi Strategi JP	Total	Rank
Strategi presence at sea (kehadiran di laut)	0,243	0,114	0,354	0,095	0,110	0,084	0,485	1
Strategi explore/exploit the sea (pemanfaatan laut)	0,507	0,422	0,572	0,372	0,364	0,422	0,219	3
Strategi Trust Build by Sea (diplomasi)	0,240	0,340	0,181	0,177	0,176	0,257	0,297	2

Kehadiran di laut atau Presence at Sea merupakan pendekatan strategi yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi dinamika situasi yang terjadi di LCS. Hal ini membutuhkan kemampuan hadir dari kapal-kapal pemerintah seperti kapal militernya TNI AL, kapal penegak hukum seperti Kapal Negara (KN) Bakamla RI dan Kapal Patroli (KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam bukunya berjudul "Maritime Diplomacy in the 21st Century," Christian Le Mière menekankan bahwa kehadiran angkatan laut adalah alat krusial dalam diplomasi maritim. Hal ini dikarenakan kemampuannya untuk menggabungkan aspek pencegahan militer dengan pembangunan hubungan diplomatik, menjadikan angkatan laut sebagai elemen utama dalam strategi keamanan dan diplomasi internasional.

Membangun kepercayaan melalui diplomasi kelautan melibatkan dialog yang intensif dan kooperatif, terutama dalam sengketa batas laut. Dialog yang tematik dan efektif, didukung oleh transparansi dan keterbukaan informasi, penting untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan ini mencakup berbagai mekanisme diplomasi, termasuk pengaturan sementara dan kerjasama regional, yang bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik dan mencapai solusi damai di wilayah sengketa.

Pilihan terakhir pada strategi pemanfaatan sumber daya laut untuk kepentingan nasional, termasuk sektor-sektor ekonomi biru seperti perikanan, energi, dan pariwisata. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara meskipun dapat memperkuat pertahanan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan memberikan dampak penangkalan yang relatif lebih Kecil dibandingkan kehadiran dan diplomasi langsung. Namun demikian, penguasaan dan pemanfaatan laut menunjukkan kapasitas dan kapabilitas suatu negara, serta menjadi bagian dari upaya membangun daya gentar dalam konteks sengketa wilayah.

PENUTUP

Menghadapi dinamika lingkungan strategi di LCS, Indonesia dapat mengadopsi tiga pendekatan utama dalam menghadapi dinamika konflik di Laut Cina Selatan (LCS) yang berpotensi mempengaruhi keamanan dan kedaulatan negara yaitu presence at sea (kehadiran di laut), explore/exploit the sea (pemanfaatan sumber daya laut) dan trust build by sea (diplomasi kelautan). Dari ketiga strategi tersebut, dihadapkan dengan sumber daya dan urgensinya, dapat disusun prioritas strategi dalam menghadapi risiko dinamika lingkungan strategis

di LCS yaitu prioritas pertama presence at sea. Hal ini disebabkan karena menunjukkan kekuatan dan kredibilitas negara melalui kehadiran dan pene-gakan hukum di laut, yang efektif dalam mem-bangun daya tangkal dan mencegah eskalasi kon-flik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, F., (2006), *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Acharya, A., (2001), *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. London: Routledge.
- Anto Dajan, 1986, *Pengantar Metode Statistik II*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsana, A, (2017), *Diplomasi Kartografi di Laut Natuna Utara*, pada harian Kompas tanggal 24 juli 2017.
- Ayu R.S., dkk (2021), *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, *Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2 (2021): 167-188
- Badari (2023), *Strategi Operasi Kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI dalam Pengendalian Laut di Laut Natuna Utara*, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.10 No.2 Tahun 2023, hal:762-778
- Bandur, A, (2016), *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Beckman, Robert. "The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea." *The American Journal of International Law*, Vol. 107, No. 1 (2013): 142-163.
- Boyd, John R. (1987), *A Discourse on Winning and Losing*, Maxwell Air Force Base, AL: Air University Press. Bueger, C. (2015). *What is Maritime Security?* *Marine Policy*, 53, 159-164.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Charity Butcher (2006), *Offense–Defense Theory: An Empirical Test*, *International Studies Review*, Volume 8, Issue 3, September 2006, Pages 489–491
- Robert P. Haffa Jr. (2018), *The Future of Conventional Deterrence: Strategies for Great Power Competition*, *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 12, No. 4 (WINTER 2018), pp. 94-115 Published by: Air University Press
- Creswell, J.W., (2010), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J.W., (2013), *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*, Third Edition.
- Darmadi, H. (2011), *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Erickson AS et.al., (2019), *China’s Maritime Gray Zone Operation*, *Naval War College Review*, Volume 72, Number 4 Autumn 2019
- Evan S. Medeiros (2005), *Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability*, dalam *The Washington Quarterly*, Vol. 29, No. 1, 2005, hlm. 145-167. Fallon, T., (2015), *The New Silk Road: Xi Jinping's Grand Strategy for Eurasia*, *American Foreign Policy Interests* 37, no. 3 (2015): 140-147.
- Geoffrey., T. (2014), "Naval Diplomacy in the 21st Century." *Journal of Strategic Studies*, vol. 37, no. 3, pp. 438-460.
- Glenn H. Synder (1961), *Deterrence and Defense*, New Jersey: Princeton University Press.
- Haffa, R.P., (2018). *The Future of Conventional Deterrence: Strategies for Great Power Competition*. *Strategic Studies Quarterly*, 12(4), 94–115.
- Hasjim Djalal (1990), *Potential Conflict in The South China Sea: In Search of Cooperation*, *Indonesian Quarterly XVIII*, No.2 (Second Quarter).
- Heiduk, et.al., (2021), *AUKUS, China, and the Indo-Pacific: The Strategic and Legal Implications*, *German Institute for International and Security Affairs (SWP)*.
- Kamarani, S., dkk (2023), *Nasionalisme dan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok: Implikasi bagi Kawasan Asia Tenggara*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7 No.1 Juni 2023
- Kapusta, P. (2015), *The Gray Zone*. *Journal of Special Warfare*, Vol. 28, No. 4 (October-December 2015): 18-25
- Kemlu (2016), *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*, *Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian luar Negeri Republik Indonesia*.
- Kusumasomantri, A.R., (2019), *Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Laut Tiongkok Selatan*, *Global: Jurnal Politik Internasional*, Volume 17 No.1 Article 4
- Leavy, P. (2017), *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*, The Guilford Press, New York.

- Lykke, Arthur F., Jr. (2001). "Defining Military Strategy." In *Military Strategy: Theory and Application*, edited by Arthur F. Lykke, 3-8. Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College.
- Mahan, A. T. (1980). *The influence of sea power upon history, 1660-1783*. Dover Publications.
- Major Ryan Burkholder (2023), *Tackling Russian Gray Zone Approaches in the Post–Cold War Era* *Journal of Advanced Military Studies* vol. 14, no. 2. Mazarr, Michael J (2015), *Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict*. *Journal of Strategic Studies Institute*, U.S. Army War College Press, December 2015.
- Medcalf, Rory (2020). *Indo-Pacific Empire: China, America and the Contest for the World's Pivotal Region*. Manchester University Press.
- Michael Green dkk.(2017), *Deterrence Theory and Gray Zone Strategies*, Center for Strategic and International Studies
- Miles, M. B., Huberman, A.M. and Saldana, J., (2018) *Qualitative Data Analysis*, (Fourth Edition), SAGE Publication. Ltd. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono (2016), *Pancasila Sebagai Orthodoxi dan Orthopraxis Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, *Jurnal Humanika*, Vol. 23, No. 2.
- Nainggolan, P.P., (2013), *Konflik di Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan*, Penerbit Azza Grafika.
- Nasution, (1998), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito
- Riehle, K.P., (2013), *Assessing Foreign Intelligence Threats*. *American Intelligence Journal*, 31(1), 96–101. Saaty, Thomas (1990), *The Analytic Hierarchy Process*, USA, Pittsburg: RWS Publication.
- Saaty, T. L. (2008). *Decision making with the analytic hierarchy process*. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83-98.
- Saeri, M., (2012), *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, *Jurnal Transnasional*, Vol. 3, No. 2, Februari 2012
- Sanapiah, F., (1990), *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang
- Sarwono, J., (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Graha Ilmu: Yogyakarta)*
- Soewarso (1985), *Kumpulan Karangan Tentang Evolusi Pemikiran Masalah Keangkatan lautan*, Jakarta: Seskoal.
- Sugiyono (2018), *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV. Alfabeta
- Supriyanto, M. (2014), *Tentang Ilmu Pertahanan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Supranto, J. 2000. *Statistik (Teori dan Aplikasi, Edisi Keenam)*. Jakarta. Erlangga
- Susmoro., H, (2019), *Penamaan Laut dan Samudera, Tata Cara dan Implikasinya*, Pushidrosal
- Walt, Stephen M., "Alliance Formation and the Balance of World Power," dalam *International Security*, Vol. 9, No. 4, 1985, hlm. 3-43.
- Wulan, Hendra & Martharaharja, Januar & Sutrasna, Yudi & Sugiono, Ahmad. (2020). *Application of Analytical Hierarchy Process (AHP) in Determining Maritime Defense Strategy as a Follow-Up to Conflict in Natuna Sea*, *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 3s, (2020), pp. 382-394.
- Zou, Keyuan (1999). "The Chinese Traditional Maritime Boundary Line in the South China Sea and Its Legal Consequences for the Resolution of the Dispute over the Spratly Islands." *The International Journal of Marine and Coastal Law* 14, no. 1 (1999): 27-55.